**Pemberdayaan Masyarakat** **Melalui Program Desa Tangguh Bencana**

**di Kabupaten Kutai Kartanegara**

# Penulis:

# Tri Dewi Wijayanti[[1]](#footnote-1), Arwanto Harimas Ginting[[2]](#footnote-2)

# Afiliasi:

# Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia1, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jawa Barat, Indonesia2

# e-Mail:

# [tridewiwijayanti@ymail.com](mailto:tridewiwijayanti@ymail.com)1, aaarwanto@gmail.com2

**\*Corresponding author**

Tri Dewi Wijayanti

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Email: tridewiwijayanti@ymail.com

Phone: (62) 85270154250

## ABSTRACT

*Kutai Kartanegara has a high category of disaster vulnerability index. The large number of disaster victims at the community level encourages the Government to develop community-based programs. Community empowerment through the Resilient Village Disaster Program in Kutai Kartanegara District is an important study aimed at increasing the ability, knowledge and independence of the community in facing and overcoming disaster problems. The research method in this research is a descriptive research method with an inductive approach. Meanwhile, data collection techniques are semi-structured interviews, observations, and documentation. The author analyzes the data, through a process that is, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of observations of the implementation of Community Empowerment, through the Resilient Village Disaster Program have been going well. This is influenced by supporting factors in the implementation of this program, namely community participation, the contribution of the implementers of the activities and cooperation between the parties concerned. The inhibiting factor of program implementation is the limited time of the community and the budget that does not exist every year. The author provides suggestions for stakeholders to make this program sustainable (sustainable), increase the number of Resilient Villages Disaster and add facilitators, as well as the community needs to exercise mastery in the form of anticipation and ways of disaster management Resilient Village Disaster and add facilitators, and the community needs to take control in the form of anticipation and disaster management.* **Keywords:** Empowerment; Community Empowerment; Resilient Village Disaster

# ABSTRAK

Kutai Kartanegara memiliki indeks kerawanan bencana berkategori tinggi. Banyaknya korban bencana di tingkat masyarakat mendorong Pemerintah untuk mengembangkan program berbasis komunitas. Pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kajian penting yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi masalah kebencanaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Sedangkan, Teknik pengumpulan data adalah wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi. Penulis menganalisa data, melalui proses yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pengamatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, melalui Program Desa Tangguh Bencana sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh Faktor pendukung di dalam pelaksanaan program ini, yaitu partisipasi masyarakat, kontribusi para pelaksana kegiatan dan kerjasama antara pihak yang terkait. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program adalah keterbatasan waktu masyarakat dan anggaran yang tidak setiap tahun ada. Penulis memberikan saran kepada *stakeholder* agar menjadikan program ini berkelanjutan *(suistainable),* menambah jumlah Desa Tangguh Bencana dan menambah fasilitator, serta masyarakat perlu melakukan penguasaan dalam bentuk antisipasi dan cara penanggulangan bencana. **Kata kunci**: Pemberdayaan; Pemberdayaan Masyarakat; Desa Tangguh Bencana

**PENDAHULUAN**

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan sosial. Masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan sosial dengan cara menjaga keselarasan harmonisasi, keseimbangan, keserasian dan kelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan isi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berisikan tentang tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, serta masyarakat agar bekerja sama dalam kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang letak geografisnya dilalui oleh tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai ―supermarket‖ bencana (Haryadi, 2012). Bermacam-macam bencana yang terjadi di antaranya termasuk bencana geologi (gempa bumi, aktivitas vulkanik) dan bencana hidrologi (banjir, tanah longsor, tsunami). Berdasarkan data dari Emergency Events Database (EM-DAT), Indonesia termasuk lima besar negara yang rawan bencana dan termasuk sepuluh besar negara dengan angka kematian tertinggi akibat bencana pada 2014 (EMDAT, 2015; Guha-sapir et al., 2015).

Perolehan indeks pada data BNPB secara *online* pada <https://www.bnpb.go.id/> yang diunduh pada tanggal 16 Oktober 2018 mengenai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah dalam salah satu daerah dengan kerawanan bencana berkategori tinggi dengan skor kerawanan adalah 65 dari ranking indeks 175 secara nasional. BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengidentifikasi jenis ancaman bencana

yang terdiri atas 13 ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun jenis-jenis bencana yang telah diidentifikasi untuk bencana alam adalah bencana banjir dan, puting beliung, dan kekeringan serta bencana gulma, kerusakan lingkungan, dan kebakaran permukiman, hutan, dan lahan. Selain itu, juga terdapat bencana kesehatan yaitu *zoonosis* (wabah penyakit), kegagalan teknologi untuk kedaruratan industri dan transportasi, serta bencana sosial yang meliputi kerusuhan sosial dan terorisme.

Berdasarkan data BNPB yang tersedia secara *online* pada <https://www.bnpb.go.id/> diunduh pada tanggal 16 Oktober 2018, Rekapitulasi banyaknya bencana alam yang ada di Kabupaten Kutai kartanegara pada tahun 2012 s/d 2017 dalam situs BNPB yang diakses pada 28 Oktober 2018, menunjukan bahwa setiap tahunnya terdapat bencana alam di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yang dilihat dari jumlah total kejadian mencapai

19 kejadian yang banyak menimbulkan kerugian bagi warga yang terkena dampak dari bencana tersebut. Terjadinya bencana ini semakin didukung oleh kondisi iklim jenis tanah, geografis, potensi ekonomi dan kependudukan yang mengakibatkan adanya potensi terjadi bencana menjadi semakin meningkat.

Penanggulangan menurut Purnama (2012:5) adalah sebagai berikut :

Proses atau upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi dan mengatasi suatu situasi dan kondisi. Bencana merupakan manifestai peraduan antara marabaya (yang sebelumnya bersifat potensial) dengan manusia (objek lain yang menyangkut kepentingan manusia) sehingga menjadi keadaan darurat yang mendesak.

Menurut Nurjanah, dkk (2013:11) suatu kejadian dapat digeneralisasi sebagai bencana apabila memenuhi beberapa kriteria kondisi sebagai berikut :

1. Adanya peristiwa yang terjadi;
2. Peristiwa tersebut terjadi disebabkan faktor alam maupun faktor manusia;
3. Terjadi secara tiba-tiba,namun dapat juga terjadi secara perlahan-lahan ataupun bertahap;
4. Menimbulkan kerugian harta benda, sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, hilangnya jiwa manusia dan lain sebagainya; dan
5. Penanggulangannya berada di luar kemampuan masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, yang meliputi:

1. Pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan (upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman bahaya), mitigasi (upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman bahaya), kesiapsiagaan (persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi bencana), serta peringatan dini.
2. Tanggap Darurat (Emergency Response), saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat pascabencana yang berfungsi untuk meringankan penderitaan bagi para korban bencana, seperti kegiatan Search and Rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian.
3. Pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan (suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi), rehabilitasi (perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek), dan rekonstruksi (perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek).

Banyaknya korban dari masyarakat yang terkena bencana mendorong pemerintah. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena tingkat kesiapsiagaan seseorang bersifat dinamis, artinya dapat menurun setiap saat seiring berjalannya waktu (Hidayati et al., 2006). Menanggapi hal tersebut pemerintah sedang gencar menjalankan program untuk membangun Desa Tangguh Bencana (Destana). Program dari Desa Tangguh Bencana ini merupakan cara untuk mencegah adanya risiko pada saat bencana terjadi pada daerah terutama pada wilayah desa.

Desa Tangguh Bencana adalah program Nasional yang berdasar pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Tangguh. Program ini adalah wujud rasa tanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana pemerintah terhadap masyarakatnya. Karena masyarakatlah yang pertama kali akan menerima kerugian dan dampak secara langsung dari bencana dan juga menjadi pelaku dan merespon secara langsung pada bencana yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat perlu diberikan pembekalan dalam konteks pemberdayaan agar selalu siap dan tangguh dalam menghadapi bencana.

Adapun ruang lingkup kerja penulis yaitu mengamati Pemberdayaan Masyakat melalui Program Desa Tangguh Bencana beserta dinas terkait dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana secara optimal.

BNPB telah melaksanakan Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dengan mengembangkan Program Desa Tangguh Bencana. Program Desa Tanggguh Bencana dari tahun 2012 s/d 2017 mencapai 266 desa/kelurahan termasuk Desa Purwajaya dan Kelurahan Loa Ipuh Darat, yang ditunjuk langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana.

Selain penelitian ini dilaksanakan di

2 desa, Desa Purwajaya dan Kelurahan Loa Ipuh Darat. Pada periode yang akan BNPB mengembangkan Program Desa Tangguh Bencana ke 100 desa/kelurahan lain, dua diantaranya adalah 2 desa yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Desa Kota Bangun Ulu dan Desa Muara Kaman Ilir.

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kutai Kartanegara, terhadap upaya dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana.

Peneltian yang dilaksanakan penulis bermaksud untuk memperoleh informasi yang berada di lapangan, dengan demikian dapat diketahui jawaban dari permasalahan mengenai bagaimana memberdayakan masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus penelitian yang ditetapkan penulis adalah sebegai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Program Desa Tangguh Bencana, di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat, dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana, di Kabupaten Kutai Kartanegara?

Adapun harapan penulis hasil dari penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Pendidikan Diploma IV pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan menambah pengalaman empiris bagi praja agar siap bertugas di daerah. Selain itu juga, bisa menjadi referensi yang dapat dipakai sebagai bahan kajian akademis dalam proses belajar praja serta menambah pengetahuan tentang konsep pelaksanaan kebijakan dan partisipasi masyarakat dan diharapkan para praja dapat menjadiperantara bagi masyarakat dalam mengetahui Program Desa Tangguh Bencana.

Memberdayakan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat. Masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengelola dan berorganisasi dengan potensi yang dimiliki masyarakat dengan bekerja bersama masyarakat (working with people) dan menolong dirinya sendiri (to help people to help themself). Suharto dalam Huraerah (2008:135) menjelaskan : Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan 5P, yaitu:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya

eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

1. Penyokong: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
2. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya bukan ditujukan secara individual, tetapi juga secara kolektif (individual self empowerment maupun collective self empowerment), sebagai bagian dari aktualisasi. Manusia menjadi tolak ukur normatif, yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya dalam memberdayakan masyarakat, dilakukan pengenalan hakekat manusia agar dapat memberi sumbangan atau meningkatkan pengetahuan, saat konsep atau program diterapkan.

Masyarakat dapat dilihat dari berbagai sisi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah memberdayakan dalam artian melindungi. Proses pemberdayaan bertujuan untuk mencegah agar yang lemah menjadi makin lemah atau kekurang berdayanya masyarakat dalam menghadapi sesuatu yang kuat. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Memberikan perlindungan bukan berarti menutupi dari adanya interaksi, karena hal tersebut malah akan membuat yang kecil menjadi merasa lebih kecil dan membuat yang lemah menjadi merasa makin lemah. Memberikan perlindungan dapat dilihat dari bermacam- macam upaya dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Penulis menyimpulkan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk upaya pengembangan kekuatan atau daya pada masyarakat dengan memberikan peluang, kesempatan, perlindungan dan dorongan dengan tidak mengatur kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk meningkatkan potensi, dengan harapan agar masyarakat tersebut dapat mengembangkan aktualisasi diri dan kemampuan atau ikut berpartisipasi dalam aktivitas program tersebut.

**METODE PENELITIAN**

Penulis melaksanakan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dalam melakukan pengumpulan data tidak memadukan data dengan teori, tapi dengan fakta lapangan yang peneliti temukan dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan induktif merupakan suatu metode penelitian, yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan tempat penelitian yang dilaksanakan dengan cara berangkat dari fakta-fakta empirik, yang diperoleh dari fenomena yang diamati dan dikaji di tempat peneltian yaitu tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data kualitatif dikumpulkan menggunakan metode pengamatan: 1) Ensterberg dalam Sugiyono (2012:73) dengan melakukan wawancara semiterstruktur yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dan lebih terbuka. Teknik Observasi yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teknik observasi partisipatif aktif Menurut Hadi (1986) dalam Sugiyono (2012:145), untuk mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. 3) Sugiyono (2013:329) menyebutkan, “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”. Penulis mengumpulkan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dana dan sumber data yang telah ada.

Penentuan informan dalam penelitian ini bersifat purposive. Adapun yang menjadi informan utama penelitian adalah Kepala Pelaksana BPBD dan jajarannya serta informan pendukung yang berhubungan dengan penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu seluruh masyarakat di Desa Purwajaya dan Kelurahan Loa Ipuh Darat yang diambil secara purposive sampling dengan mengambil beberapa perwakilan sebagai tokoh masyarakat yang mengurus pelayanan di Desa Tangguh Bencana tersebut.

Observasi dilakukan dengan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan judul. Serta dokumentasi yang diambil oleh penulis dari berbagai kegiatan yang dilakukan baik berupa dokumen – dokumen berbentuk tulisan seperti peraturan, surat dan arsip yang ada di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan sebelum turun ke lapangan, saat berada dilapangan, dan setelah kembali dari lapangan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang telah diperoleh.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Urusan bencana adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang memiliki kaitan dengan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari Sub-Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub-Bencana dan Sub-Kebakaran. Berlakunya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang terintegrasinya penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang mempunyai kemampuan dalam mengetahui bentuk ancaman yang ada di wilayahnya dan bisa mengenali bentuk ancaman yang ada wilayahnya, dan mampu mengatur sumber daya yang ada di masyarakat sehingga dapat mengurangi kerentanan dan untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan demi meminimalisir adanya risiko bencana.

Kemampuan masyarakat diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan yang meliputi, kegiatan-kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan serta meningkatkan kapasitas untuk memulihkan pasca keadaan darurat. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi masalah kebencanaan ini, dapat dilakukan dengan salah satu program dari BNPB yang dilimpahkan kepada daerah untuk melaksanakan program tersebut, yaitu yang salah satunya dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana.

Program dilaksanakan di Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Purwajaya. Program BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah Program Desa Tangguh Bencana, tetapi dalam pelaksanaanya dilakukan di kelurahan dan desa. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori Suharto (2014:67-68), ada lima dimensi yang dapat dijadikan ukuran dalam memberdayakan masyarakat, khususnya pada pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana, yaitu antara lain:

1. Pemungkinan (Enabling)

Pemberdayaan melalui dimensi pemungkinan pada program Desa Tangguh Bencana adalah pengelolaan resikodengan masyarakat yang sebagai pelaku aktif dalam mengkaji dan mengevaluasi upaya pengurangan risiko bencana, dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Pemberdayaan yang dilaksanakan harus mampu mengatasi masalah-masalah kebencanaan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada umumnya masyarakat sangat kurang mengetahui tentang kebencanaan. Disinilah letak peran pentingnya pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar mampu menggali potensi-potensi yang ada pada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kebencanaan.

Pemberdayaan melalui dimensi pemungkinan pada program Desa Tangguh Bencana merupakan pengelolaan resiko dengan masyarakat yang sebagai pelaku aktif dalam mengkaji dan mengevaluasi upaya pengurangan risiko bencana, dengan menggunakan sumber daya yang ada. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat sasaran Program Desa Tangguh Bencana, mengenai tanggapan masyarakat terhadap program ini dalam mengenali potensi yang ada dalam diri masyarakat, dan menggunakan potensi itu untuk mengatasi masalah kebencanaan yang ada untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan melalui Program Desa Tangguh Bencana di kawasan tersebut.

2. Penguatan (empowering)

Peningkatan kemampuan masyarakat dilakukan dengan cara melakukan beberapa pelatihan-pelatihan yang diberikan dari petugas operasional yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang pemadaman kebakaran dan bencana yang diikuti oleh 180 orang petugas operasional, kemudian diturunkan kepada masyarakat melalui pelatihan yang diberikan melalui program Desa Tangguh Bencana dengan harapan, masyarakat mampu untuk mandiri dalam menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

Selain melakukan peningkatan kemampuan, masyarakat juga harus diberi pengetahuan yang berhubungan dengan kebencanaan melalui pelatihan yang ada dalam program Desa Tangguh Bencana dengan tujuan, masyarakat mendapatkan peningkatan kemampuan yang didukung dengan kegiatan-kegiatan yang disosialisasikan dan disimulasikan kepada masyarakat, khususnya pada relawan-relawan pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana agar masyarakat mampu menyerap sedikit banyaknya informasi yang disampaikan, melalui simulasi dan sosialiasi yang dilakukan.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Purwajaya, yaitu hampir setiap bulan dilaksanakan sebanyak dua kali. Tetapi setelah program itu berjalan dan terlaksana, sosialisasi menjadi berkurang hingga tiga bulan sekali pelaksanaanya.

3. Perlindungan (Protecting)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemerintah daerah, telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi segenap bangsa dan Negara dalam mengatasi ancaman bencana, dengan memberikan beberapa kebijakan yang dikeluarkannya. Diantara kebijakan yang diberikan pemerintah, terdapat beberapa kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan terdapat dalam Peraturan Lurah Loa Ipuh Darat Nomor 003 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas Kelurahan Loa Ipuh Darat pada pasal (6-7).

4. Penyokongan (Supporting)

Pemberdayaan masyarakat melalui dimensi penyokongan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mampu memerankan tugas dalam memenuhi kebutuhannya. Memberdayakan masyarakat berarti menjaga masyarakat agar tidak menjadi lemah dan jatuh ke keadaan yang tidak menguntungkan. Perlu dilakukannya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat menjadi mandiri dan berketerampilan dalam mengatasi urusan kebencanaan.

Peran fasilitator yang dibantu oleh relawan-relawan yang telah dibentuk sangatlah penting untuk memotivasi masyarakat untuk dapat menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Masyarakat dapat termotivasi bahwa masyarakat bisa mandiri dalam menghadapi bencana dengan adanya fasilitator pada setiap Desa Tangguh Bencana yang dipilih untuk membantu masyarakat di wilayah tersebut. Melalui sosialisasi dan pelatihan yang diberikan dibantu oleh perangkat Badan Penanggulangan Bencana diharapkan masyarakat dapat termotivasi untuk tidak lemah dan hanya menerima keadaan yang diakibatkan oleh bencana.

5. Pemeliharaan (Fostering)

Tugas untuk menciptakan kondisi yang kondusif bila terjadi suatu bencana bukan hanya menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja, tetapi juga menjadi tugas instansi lainnya yang memiiki tugas dan fungsi yang sama. Masyarakat juga diberikan pemahaman yang berkaitan dengan kebencanaan agar jika terjadi suatu bencana, masyarakat tidak menjadi panik dan tetap terpeliharanya situasi yang aman dan kondusif ditengah keramaian masyarakat.

Menciptakan situasi yang kondusif, diperlukannya kerjasama dan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan kebencanaan. Selain itu masyarakat juga dituntut memliki pengetahuan, kemampuan dan kemandirian dalam mengatasi masalah kebencanaan agar mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif jika terjadinya bencana.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Tangguh Bencana

1. Partisipasi Masyarakat

Rasa keingintahuan masyarakat yang tinggi, terhadap masalah kebencanaan dengan tujuan menjadi masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana, dapat meminimalisir dampak kerugian yang dihasilkan setelah terjadinya bencana dan menimbulkan respon positif yang sejalan dengan tujuan pemerintah, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, tanggap dan mandiri dalam menangani dan menanggulangi masalah kebencanaan.

Adanya relawan Desa Tangguh Bencana membuktikan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang baik dan kesadaran akan pentingnya mengetahui tata cara penanggulangan bencana dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang didapat daripada sebelum mengetahui hal tersebut. Dari jumlah penduduk pada Desa Purwajaya dan Kelurahan Loa Ipuh Darat dapat diketahui bahwa 40% penduduk dalam rentang usia 20 hingga 35 tahun ikut berpartisipasi aktif dalam menjalankan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Kontribusi Para Pelaksana Kegiatan

Penanggulangan bencana sebagai wujud partisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Fasilitator, relawanmaupun organisasi masyarakat, ikut berkontribusi dalam program Desa Tangguh Bencana.Berbagai dukungan yang diberikan oleh masing-masing pelaksana kegiatan diantaranya seperti: kemampuan, pemikiran, keahlian, tenaga, material dan lain sebagainya. Dukungan tersebut menjadi modal utama terselenggaranya Program Desa Tangguh Bencana dengan baik. kontribusi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Fasilitator dan relawan Desa Tangguh Bencana berjalan dengan baik dalam meminimalisir dampak da pemenuhan kebutuhan, masyarakat ikut turun tangan berkontribusi saat terjadi bencana di Kelurahan Loa Ipuh Daratbaik berupa bantuan kemampuan, tenaga dan materil yang menjadi kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana.

1. Kerjasama yang Baik

Kerjasama yang baik diantara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta dengan pihak pendukung program tersebut yaitu Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Purwajaya, dibantu oleh para relawan program tersebut menciptakan terlaksananya porses pemberdayaan masyarakat yang baik sesuai dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya program. Selain itu, dengan kerjasama yang baik juga memunculkan feedback atau masukan dari pelaksana kegiatan agar mampu mengevaluasi diri sehingga dapat memaksimalkan kinerja untuk menciptakan proses pemberdayaan yang lebih maksimal sebelumnya.

Keuntungan yang diperoleh telah dirasakan oleh beberapa pihak yang melaksanakan kerjasama, antara lembaga pemerintah dan masyarakat Desa Tangguh Bencana dalam menanggulangi bencana. Adanya kerjasama membuat suatu masalah kebencanaan yang sebelumnya sulit ditangani oleh masyarakat secara individual yang menyebabkan banyaknya dampak risiko bencana yang dirasakan setelah terjadinya bencana dapat menjadi lebih mudah ditangani.

1. Individu Masyarakat

Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana, selain terdapat keaktifan oleh pelaksana program, masyarakat juga mempunyai masalah tersendiri, yakni kesibukan masyarakat, seperti masyarakat mempunyai pekerjaan yang tidak dapat tertunda dan bertepatan dengan pelaksaan program tersebut. Sebagian besar masyarakat di desa berprofesi sebagai petani, peternak dan buruh yang menyebabkan masyarakatnya tidak dapat ikut berpartisipasi dalam program Desa Tangguh Bencana dikarenakan waktu pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bersamaan dengan waktu bekerja masyarakat yang notabenenya bergantung pada penghasilannya sehari-hari.

1. Anggaran

Pada Tahun 2012-2016 Program Desa Tangguh bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan secara rutin. Secara program Desa Tangguh Bencana baru terbentuk pada tahun 2014, dan dilaksanakan secara menyeluruh pada tahun 2016. Pada Tahun 2017-2018 berkenaan dengan adanya keterbatasan dana kegiatan sempat terhenti.

Pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kutai Kartanegara mengalami perubahan Organisasi Perangkat Daera yang menyebabkan menghilangnya anggaran yang seharusnya digunakan sebagai dana dalam memfasilitasi Program Desa Tangguh Bencana yang ada di Kutai Kartanegara. Masyarakat pada desa tetap menjalankan program Desa Tangguh Bencana. Badan Penangulangan Bencana Daerah hanya bertugas untuk menjadi motivator.

Program Desa Tangguh Bencana sempat terhambat pada tahun 2017 dikarenakan tidak adanya dana dari Badan Nasional Penanggulangan Becana dan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menjadi Dinas Pemadam Kebakaran, apabila diteruskan tidak hanya akan berakibat terhambatnya program tetapi juga menyebabkan aset akan ditarik kembali oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengakibatkan aset akan habis.

Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi Faktor Penghambat Pemerintah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Dinas Kesehatan, relawan/masyarakat dan Instansi Pemerintahan lain yang terlibat telah bekerja sama melaksanakan program ini dengan baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan masyarakat melalui penyusunan rencana kontijensi, pembuatan peta bencana dan koordinasi antara relawan dan pegawai Badan Penanggulangan Bencana dan koordinasi antara relawan dan pegawai BPBD Provinsi dan kabupaten/kota pada acara seperti gladi posko, uji coba alat bencana. Adapun usaha kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan

Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengkajian maka dipilih metode PRA (Participatory Rural Appraisal) atau pengkajian kondisi desa partisipatif. Metode PRA menjadi pilihan metode yang paling nyaman. PRA menggunakan beragam metoda visualisasi sehingga lebih menarik, mudah dipahami, tidak membosankan santai dan informal. PRA telah dilaksananakan dari tahun awal terbentuknya Desa Tangguh Bencana mendorong masyarakat untuk ikut serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisa keadaan masyarakat terhadap kehidupan dan kondisinya, agar masyarakat dapat membuat rencana dan tindakan masyarakat itu sendiri. Fasilitator dalam pelaksanaannya sangat berpengaruh terhadap hasil dalam pelaksanaan- pelaksanaan program, tujuan dari pengkajian kondisi desa partisipatif adalah untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan serta menguatkan masayrakat agar mau untuk menggali potensi dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya.

1. Pendekatan Aset Kehidupan

Hampir semua aset penghidupan berpotensi rusak atau hilang akibat suatu kejadian ancaman, kerusakan atau kehilangan satu atau lebih Janis aset penghidupan dapat mengganggu kemampuan suatu manusia mempertahankan hidup.

Upaya untuk memberikan pemahaman melalui sosisalisasi tentang pentingnya suatu aset kehidupan bagi masyarakat, dan bagaimana untuk menyiapkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menghadapi bencana dan dampak risiko, yang akan dihadapinya serta mengelola pengetahuan menjadi kesadaran kolektif dalam masyarakat sehingga dapat tahan/tangguh dalam menghadapi bencana yang menimpanya. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat bisa bekerja sama dan bergotong royong melindungi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana, yang ada pada suatu desa/ kelurahan dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait setempat, untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program- program ataupun kegiatan pembangunan fisik dan non fisik. RPB desa/ kelurahan mengandung strategi, kebijakan dan langkah langkah teknis administratif yang dibutuhkan, untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.

Rencana Aksi Komunitas merupakan rencana kegiatan komunitas dalam bentuk tabel dalam mengelola pengurangan risiko bencana sekaligus sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan rencana

Penganggulangan bencana. RAK disebut merupakan turunan dari Prioritas Program adalah yang ruang lingkupnya merupakan upaya-upaya / pilihan tindakan pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan)

1. Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.

Penyebarluasan dan komunikasi mengisyaratkan bahwa masyarakat perlu memiliki beragam alat untuk melakukan evakuasi. Alat alat komunikasi untuk penyebaran peringatan kepada warga harus dijaga dan dirawat, agar selalu berfungsi. Jenis alat komunikasi untuk penyebaran peringatan ini perlu dipertimbangkan kemudahan dalam pembuatan, pengoperasian dan perawatan yang dapat dilakukan oleh warga secara mandiri. Karenanya alat berasal dari kearifan lokal disarankan untuk digunakan, misalnya kentongan, bedug, alat tiup / pukul lain. Alat komunikasi berteknologi tinggi atau yang bergantung pada catu daya listrik PLK terkadang tidak selalu handal, misalnya sirine. Alat dengan suku cadang yang didatangkan dari luar daerah juga kadang membuat ketergantungan untuk perawatannya. Setiap warga seharusnya mempunyai pemahaman yang sama tentang isi dan arti peringatan yang disepakati atau dipatuhi bersama.

Perlu diupayakan menggunakan beberapa jenis alat komunikasi penyebaran peringatan untuk memastikan agar 1) bila satu alat penyebaran peringatan gagal ada alat komunikasi lain yang dapat digunakan, 2) peringatan dapat diterima oleh lebih banyak masyarakat, dan 3) Memperkuat pesan peringatan.

Seberapa besar alat peringatan dapat mengurangi dampak suatu peristiwa bencana akan sangat bergantung pada beberapa faktor, misalnya:

1. Jarak waktu yang tersedia antara keluarnya peringatan sampai datangnya peristiwa yang dapat menimbulkan bencana.
2. Kebenaran pesan peringatan.
3. Kesiapan perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk memiliki rencana penyelamatan diri secara tepat waktu.

d. Keputusan dan tindakan warga masyarakat untuk menyelamatkan diri. Kemampuan merespon mengisyaratkan bahwa masyarakat harus memiliki rencana evakuasi untuk penyelamatan diri dan strategi pemberian bantuan evakuasi oleh relawan saat melakukan penyelamatan diri.

Secara umum sistem peringatan diri yang terpusat pada masyarakat, sangat bergantung pada kepedulian dan partisipasi warga masyarakat desa yang terancam bahaya. Diperlukan kerjasama yang baik antar masyarakat. pemerintah dan pihak lain untuk membuat sistem peringatan dini yang berpusat pada masyarakat agar dapat selalu berfungsi, terawat dan terpercaya.

1. Pembentukan Kelompok dan Pelatihan Relawan

Pembentukan kelompok relawan pada Kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Purwajaya diatur dalam Surat Keputusan Lurah Loa Ipuh Darat Nomor 002 Tahun 2015 tentang Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana Tahun 2015- 2020 yang berjumlah 28 orang dan Surat Keputusan Kepala Desa Purwajaya Nomor 360/58/PWA/XII/2015 tentang Pembentukan Relawan Penangulangan Bencana Desa Purwajaya yang berjumlah 19 Orang.

Saat terjadi bencana disuatu tempat, maka masyarakatlah yang akan menerima akibat langsung, warga masyarakat menjadi korban atau penanggap pertama (first responder). Masyarakat sendiri dapat melakukan segala usaha untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Pada kondisi tanggap bencana khususnya, banyak dibutuhkan tenaga-tenaga yang siap untuk memberikan pertolongan segera, pencarian, penyelamatan dan evakuasi membantu memenuhi kebutuhan darurat dan sebagainya. Tenaga- tenaga tersebut adalah Relawan Penanggulangan Becana. Menjadi relawan dapat memberikan respon yang efektif dalam situasi tanggap darurat, diperlukan pengorganisasian yang baik dan berkesinambungan. Dibentuklah kelompok relawan desa/kelurahan sebagai wadah pembinaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku jiwa korsa.

Penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Hendaknya mempertahankan dan meningkatkan program untuk menjadi lebih baik dan bagi seluruh
2. Stakeholder membuat program ini bersifat berkelanjutan (suistainable).
3. Perlunya menambah jumlah Desa Tangguh Bencana. yang sudah dibentuk, maka dibentuk kembali di desa atau kelurahan lain. Melakukan pembinaan untuk Desa Tangguh Bencana terutama pada daerah tangguh bencana (daerah parah, daerah terisolasi, daerah yang sering bencana).
4. Perlunya menambah fasilitator yang berasal dari desa untuk membentuk kepercayaan dengan masyarakat tanpa mengabaikan fasilitator yang telah ada sebelumnya.

**KESIMPULAN**

Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana yaitu:

1. Mengenalkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat sehingga program memberikan dampak positif.
2. Melaksanakan sosialisasi, pemberian pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kebencanaan.
3. Membuat legislasi dan kelembagaan yang secara hukum dapat melindungi masyarakat sesuai dengan hak asasinya.
4. Memberikan motivasi masyarakat untuk dapat menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Menciptakan situasi yang kondusif, dengan melakukan kerjasama sinergitas antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.

# REFERENSI

1. Hidayati, D. et al. (2006). Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Indonesia. Indonesia: LIPI-UNESCO/ISDR.
2. Huraerah, A. (2008). *Abuse. Kekerasan* *Terhadap Anak edisi revisi*. Jakarta: Nuansa. Bandung
3. Mardikanto, T. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
4. Nurjanah, dkk. (2013). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
5. Purnama, R. (2013). *Manajemen Kedaruratan Kesehatan Lingkungan dalam Kejadian Bencana. Jakarta: Raja Grafindo Persada*
6. Soleh, C. (2014). Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Bandung: Fokusmedia
7. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods). Bandung Alfabeta
8. Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
9. Twigg, J. (2004). Good Practice Review: Disaster Risk Reduction. Mitigation and Preparedness in Development and Emergency Programming. ODI: Humanitarian Practice Network Overseas Development Institute.
10. Wasistiono, S. (2001). Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : Alqaprint
11. Wasistiono, S. (2015). Panduan Teknis Fasilitator. Jakarta: BNPB
12. https://bnpb.go.id. <https://bpbd.kukarkab.go.id/>.
13. <http://dmcdd.net/siklusmanajemen-bencana/>.
14. http://www.cred.be/sites/default/files/ADSR\_2011.pdf

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)